

DILEMATIK GERAKAN DISIPLIN NASIONAL

Oleh: J.E. Sahetapy

Beberapa waktu yang lampau, saya diundang ke Jakarta untuk membicarakan permasalahan Gerakan Disiplin Nasional. Ada dua pembicara yang akan berbicara di hadapan angkatan muda, yaitu seorang Menteri dan saya sendiri. Ternyata harapan untuk mendengarkan pandangan Bapak Menteri bertalian dengan Gerakan Disiplin Nasional ini sangat mengecewakan. Mengapa sampai dikatakan demikian?

Menurut surat undangan, Bapak Menteri akan berbicara pada pukul delapan pagi. Ternyata setelah ditunggu hampir satu jam, baru Bapak Menteri memperlihatkan wajahnya. Yang lebih mengecewakan, angkatan muda dalam sambutan terhadap kehadiran Bapak Menteri, sama sekali tidak menyinggung perilaku Bapak Menteri bertalian dengan jam yang telah ditentukan. Dengan perkataan lain, entah itu karena "kesungkunan" atau disebabkan semacam perilaku takut mengeserit, keterlambatan waktu yang demikian "molor" sama sekali tidak disinggung. Pada hal, ini baru suatu gebrakan permulaan usaha mencanangkan disiplin bertalian dengan Gerakan Disiplin Nasional.

Gerakan disiplin nasional tidak hanya bertalian dengan masalah "antre". Alangkah sempitnya pengertian dan permasalahan disiplin nasional kalau yang dimaksudkan itu hanya masalah antre. Disiplin nasional selayaknya mencakup setumpuk problematik yang kini sedang dihadapi dan secara langsung bertalian dengan skala nilai sosial yang kini dianggap sudah begitu rancu,

bahkan mengalami semacam "Umwertung aller Werte"; suatu penjungkirbalikan nilai.

Disiplin nasional yang kini disebarluaskan melalui pidato pejabat dan birokrat serta pihak penegak hukum, pada umumnya masih bersifat retorika belaka; tiada satunya kata dengan perbuatan, satunya mulut dengan tindakan. Oleh karena itu, selama masalah praksis tidak sejalan dan serasi dengan ketentuan normatif, maka selama itu pula gerakan disiplin nasional akan menjurus pada suatu keadaan "fiasko". Ambillah sebagai suatu contoh masalah disiplin berlalu lintas.

Dalam berdisiplin berlalu lintas, calon pengemudi diajarkan dan diuji untuk menyalib kendaraan di depannya dari kanan. Ternyata dalam keadaan praksis hal semacam itu tidak bermanfaat dan tidak berlaku. Apalagi kendaraan besar dan yang lambat bergerak, selalu mengambil lajur kanan. Dengan demikian, jika hanya ada dua lajur, maka tidak ada jalan lain kecuali melanggar ketentuan normatif, yaitu dengan menyalib dari kiri. Bilamana ada pihak penegak hukum yang menyaksikan, tidak akan ada suatu tindakan apapun, sehingga lama kelamaan perbuatan yang deviasi ini dianggap bukan saja benar tetapi juga aman. Bilamana pada suatu waktu ada tindakan dari pihak penegak hukum, orang akan bertanya (dalam hati), apakah ini dalam rangka menegakkan hukum ataukah dalam rangka menguras kantong. Orang pada menggerutu tetapi memang tidak ada pilihan lain. Upaya perdamaian yang sebetulnya terpuji, ternyata menjadi upaya semacam "pemerasan".

Yang sangat mengherankan yaitu di kawasan dalam kota, ada bagian-bagian tertentu yang sebetulnya bermaksud mulia dengan mengingatkan para pemakai jalan untuk membaca peringatan: "Anda memasuki daerah tertib hukum atau daerah tertib berlalu lintas". Namun peringatan itu sebetulnya suatu bumerang. Mengapa dikatakan demikian? Sebab itu berarti di luar daerah tertib hukum atau daerah tertib berlalu lintas, anda tidak terikat kepada norma-norma hukum. Dengan perkataan lain, ada banyak salah kaprah dalam rangka menegakkan tertib gerakan disiplin nasional.

Orang Indonesia sering mengeritik sikap "individualisme". Sikap tersebut dianggap tidak cocok dengan pola pemikiran dan sifat interaksi bermasyarakat di Indonesia. Tetapi apakah kritik itu kena sasaran dan benarkah sikap individualisme itu begitu buruk? Apakah lawan sikap individualisme itu harus sikap kolektivisme atau yang bagaimana! Saksikan sendiri bagaimana para penumpang berduit dan yang pada umumnya tergolong kelas mampu atau yang terpelajar berperilaku ketika mau beli tiket pesawat terbang atau ketika hendak mendaftarkan diri untuk berangkat. Bahkan dalam pesawat terbang pun tampak sikap yang begitu rancu. Bukan sikap kolektivisme yang diperlihatkan, melainkan perilaku "EGOISME". Selain tidak ada disiplin antre, orang Barat yang sedang antre pun disikut dan tanpa rasa sungkan atau malu, maju menerobos. Pada hal mereka orang Barat yang dituduh individualisme bisa dengan tertib menunggu dan menggelengkan kepala melihat perilaku manusia Indonesia yang katanya menganut faham atau ideologi dan Weltanschauung Pancasila. Lebih kasar lagi, ternyata ada penatar P4 yang tanpa rasa malu berkomentar bahwa yang diceramahkan itu tidak perlu sama dengan keadaan praksis di lapangan. Hal ini bertalian dengan permasalahan izin dan pengrusakan rumah ibadah dari agama tertentu.

Sebagaimana sudah dikatakan di atas, disiplin nasional tidak hanya bertalian dengan masalah-masalah disiplin antre, disiplin berlalu lintas dan sebagainya. Masalah korupsi adalah salah satu fenomena dari tiadanya

disiplin nasional. Yang berkolusi yang seharusnya ditindak, digunakan ungkapan eufemistik "salah prosedur" atau adanya "penyimpangan", yang sebetulnya ingin menutup kemunafikan bahwa memang ada korupsi, yang tentu masih harus dibuktikan.

Bukan suatu rahasia lagi, bahwa majunya suatu bangsa bukan saja bertalian dengan tersedianya sumber daya manusia, tetapi yang paling penting yaitu adanya disiplin untuk berlaku jujur, bekerja keras, bersedia untuk dikritik, tidak mempraktekkan diskriminasi secara terselubung seperti yang dapat disaksikan dewasa ini dengan pelbagai ungkapan yang pada hakekatnya adalah diskriminasi terselubung, seperti "demokrasi proporsional". Disiplin nasional menghendaki penempatan "the right man in the right place" dan bukan berdasarkan "sendhiko dawuh", juga bukan sebagai balas jasa karena yang bersangkutan pernah berfungsi sebagai "aide-de-camp", atau dari kelompok mayoritas.

Gerakan dan gebrakan disiplin nasional pertama-tama harus dimulai dari atas dan bukan dari rakyat jelata, rakyat periferi dan dari mereka yang tertindas dan yang merindukan keadilan dan kebenaran. Ibarat bau busuk ikan tidak berasal dari ekor, melainkan dari kepalanya ikan, begitu juga dengan gebrakan dan gerakan disiplin nasional harus dimulai dari atas. Terutama dalam suatu masyarakat yang kini menampakkan diri sebagai suatu masyarakat neo-feodal, di mana panutan dari atas merupakan suatu kriteria "conditio sine qua non", maka gebrakan dan gerakan disiplin nasional baru akan mulai berhasil kalau diperlihatkan secara nyata dan konsisten serta konsekuen dari atas, kaum elit, mereka yang berkuasa dan yang merasakan diri sebagai kelompok borjuis. Itupun gebrakan dan gerakan ini tidak akan berhasil, kalau hukum tidak ditegakkan, kebenaran dan keadilan dikebiri, sehingga media pers menjadi begitu dijinakkan.

POLRI sebagai barisan terdepan penegakan hukum akan mengalami banyak kesulitan kalau tidak diberi keleluasaan untuk bertindak. Tidak akan banyak manfaatnya kalau POLRI masih dibayang-bayangi oleh kekuatan lain yang tugas dan misinya tidak sama

dengan tugas dan misinya POLRI, apalagi kalau POLRI hanya diatur melalui "power by remote control". Perlu disadari bahwa gerakan disiplin nasional akan dihadapi pertama-tama dan terutama oleh POLRI. Jadi janganlah heran kalau POLRI akan terus dibebankan dengan banyak problematik masyarakat, sebab bagaimana sekali pun dalam masyarakat yang tertib sipil – dan bukan seperti sekarang ini dianggap sebagai dalam keadaan perang semu, sehingga secara langsung atau tidak, gebrakan dan gerakan disiplin nasional akan menjadi bumerang. Adalah suatu kesia-siaan kalau dikatakan bahwa POLRI adalah abdi masyarakat, padahal masyarakat tidak akrab dengan POLRI. Untuk itu diperlukan bukan saja polisi berdasi dan berhati, tetapi juga polisi yang bisa bernasi, alias dapurnya berasap terus menerus. Jika hal bernasi bisa diatasi, maka

tidak akan berlaku ungkapan melaporkan seekor ayam hilang, harus membayar dengan seekor sapi.

Dalam suatu kultur ketakutan yang kini melanda masyarakat kita di mana berlaku "kultur kekerasan" (Johann Galtung), tugas mengamankan dan mendamaikan hati masyarakat tidak terletak pada retorika para politisi, apalagi para politikus karbitan, melainkan pada POLRI yang profesional dan yang dikenal. Sungguh tepat ungkapan peribahasa: tak kenal maka tak cinta. Memasyarakatkan gebrakan dan gerakan disiplin nasional harus karena cinta: cinta kebenaran, cinta keadilan, cinta kedamaian yang berpulang pada cinta akan suatu negara hukum, bukan negara hukuman.

Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A. adalah Dosen Universitas Airlangga, Surabaya.